

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kota Bima. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Program Nasional berdasarkan RKP tahun 2018 yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yaitu : Urusan Wajib

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.
3. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah YANG TERKAIT KEWENAGAN TUGAS DAN FUNGSI DENGAN SEKTOR / SKPD (apabila ada)
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.3.1. Maksud Rencana Kerja Tahun 2018 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2018.
- 1.3.2. Tujuan Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Kota Bima.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2018 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, hubungan Renja Dinas Tenaga Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Disnaker Kota Bima Tahun 2018

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2017

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima
- 3.3. Program dan Kegiatan
- 3.4. Matriks Renja 2018

BAB IV. PENUTUP

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA**TAHUN 2016****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Dinas Tenaga kerja Kota Bima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183) sebagai Organisasi perangkat daerah yang baru, Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun 2016, belum dapat dievaluasi pelaksanaannya (evaluasi renja SKPD di evaluasi pada tahun Kerja tahun 2018). (tahun n-1)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Tenaga Kerja Kota Bima belum bisa melaksanakan analisa kinerja SKPD tahun 2016 yang merupakan OPD baru yang terbentuk Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183)

2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan antara lain :

1. Lapangan pekerjaan semakin terbatas;
2. Tingginya jumlah pengangguran;
3. Rendahnya tingkat pendidikan;
4. Minimnya perlindungan hukum;
5. Pemberian upah belum sesuai dengan Upah Minimum Kota;
6. Adanya faktor eksternal, seperti fluktuasi kondisi politik yang berpengaruh pada kondusifitas daerah;
7. Penganggur atau Pencari Kerja kurang memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ketenagakerjaan kaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima, diantaranya adalah : belum tersedianya gedung dan instruktur pelatihan BLK, terbatasnya tenaga fungsional pengantar kerja, mediator, dan

pengawas ketenagakerjaan, masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan angka kecelakaan kerja, masih terdapat anak dibawah umur yang bekerja, banyaknya kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri yang tidak bisa diisi oleh tenaga kerja Indonesia akibat ketidaksesuaian kompetensi dan masih rendahnya kesempatan dan perluasan kerja yang disiapkan bagi pencari kerja. Faktor-faktor eksternal dan internal lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap permasalahan ketenagakerjaan, adalah: kurangnya arus masuk modal asing yang sifatnya padat karya, lemahnya iklim investasi dalam menghadapi pasar global, berbagai perilaku birokrasi dan regulasi yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha sehingga tidak mendukung penciptaan lapangan kerja baru, rendahnya pendidikan dan produktivitas tenaga kerja, tekanan kenaikan upah bagi beberapa perusahaan yang belum stabil.

Isu Strategis Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja Kota Bima disusun berdasarkan kompilasi yang ada dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018, hasil analisis situasi dan kondisi eksisting, serta persepsi masyarakat, tokoh, dan para pakar ketenagakerjaan. Dari sejumlah isu dan permasalahan tersebut, dapat diangkat sebagai isu strategis dengan kriteria berikut :

1. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja;
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia;
3. Tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan, dan meningkatnya kasus perselisihan hubungan industrial;
4. Masih kurang maksimalnya pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.

Cakupan masalah yang luas; 1. Suatu isu atau masalah cenderung membesar di masa datang dan berdampak negatif; 2. Memiliki basis keunggulan atau potensi lokal Kota Bima; 3. Memberikan daya dorong dan daya sinergis terhadap penyelesaian sejumlah permasalahan; 4. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu. Permasalahan menurut stakeholders : 1) Sektor ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, kreativitas, dan inovasi relatif belum didayagunakan secara maksimal; 2) Sinergitas modal sosial masyarakat bagi pembangunan belum maksimal; 3) Kurang link and match-nya antara lulusan pendidikan formal dengan dunia kerja; 4) Penyerapan tenaga kerja lebih tinggi pada pekerja tidak tetap/outsourcing, berpotensi pada terjadinya pekerja kembali menjadi penganggur; 6) Tingginya angka kecelakaan kerja; 7) Tingginya pelanggaran norma kerja; 8) Kasus perselisihan hubungan industrial yang berlarut-larut.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra. Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (a-spatial). Oleh karena Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Mengingat kondisi ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik maupun sosial sangat berpengaruh pada akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019 selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, bidang ekonomi, wilayah serta pembangunan aparatur Negara. Agenda pembangunan bidang ketenagakerjaan disebut dengan *NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN*, yaitu:

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi tenaga Kerja;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;
4. Perluasan kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel

RPJPD 2015-2005 dan RPJMD Tahun 2013-2018 Provinsi NTB adalah Pembangunan jangka panjang Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang beriman, maju, dan sejahtera dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur dalam negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah sebagaimana cita-cita otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan, keadilan, kemandirian dan kemajuan yang diinginkan, arah pembangunan jangka panjang Daerah Nusa Tenggara Barat di bidang tenaga kerja adalah menyediakan lapangan kerja, diarahkan untuk:

1. Mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal.
2. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.
3. Meningkatkan produktivitas pekerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

Kebijakan Umum dan Program Prioritas RPJMD NTB Tahun 2013-2018, adalah : Meningkatkan sinergitas tenaga kerja dengan lapangan kerja dimaknai melalui kebijakan peningkatan BLK, KKK dan lembaga pendidikan keterampilan usaha lainnya

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan program dan kegiatan secara optimal. Oleh karena itu setiap Satuan Kerja harus merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai melalui program dan kegiatan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Bima secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Dinas Tenaga Kerja Kota Bima menetapkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
(1). Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Menurunkan Tingkat Pengangguran terbuka	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pembinaan lembaga pelatihan tenaga kerja swasta	Terbinanya lembaga pelatihan tenaga kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan tenaga kerja swasta yang dibina
(2). Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja	Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah Tenaga kerja yang dilatih berdasarkan jenis pelatihan, pendidikan dan ketrampilan
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Penyusunan Informasi bursa tenaga kerja	Tersedianya informasi bursa tenaga kerja	Pendaftar Pencari Kerja/ Lowongan
			Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	iklan /Brosur/ Pamflet , papan informasi
			Sosialisasi penempatan tenaga kerja luar negeri	Meningkatnya Wawasan dan pengetahuan serta pemahaman peraturan penempatan dan perlindungan TKI Luar Negeri	Jumlah Peserta Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja
			Padat karya infrastruktur	Pemberdayaan masyarakat di bidang infrastruktur di kantong-kantong pengangguran dan kantong TKI	Jumlah tenaga kerja yang dilibatkan dalam padat karya infrastruktur
			Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Tersedianya data base ketenagakerjaan	Ketersediaan Data base tenagakerjaan daerah
			Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	Terlaksananya pembinaan perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS)	Jumlah PPTKIS yang dibina
(1). Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;	(1). Persentase Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Pemeriksaan Norma Kerja, keselamatan kerja dan kesehatan kerja (K3)	Menurunnya Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan Kasus Kecelakaan Kerja	jumlah perusahaan yang diperiksa K3
(2). Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	(2).Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama		Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Kasus yang Diselesaikan
			Fasilitasi operasional dewan pengupahan daerah	Meningkatnya Falitasi Operasional Dewan Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan UMK
			Survey penetapan nilai kebutuhan hidup layak	Terpenuhinya Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) oleh Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang di Survei
			Sosialisasi undang-undang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Undang-Undang BPJS	Jumlah Peerusahaan Peserta BPJS

3.3 Program Kegiatan

Tujuan dan sasaran SKPD merupakan penjabaran teknis dari pada Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja yang dituangkan dalam bentuk Program dan Kegiatan.

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada dalam Satuan Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program dengan mengerahkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia.

secara rinci masing-masing program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja diuraikan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
 - a. Penyusunan data base tenaga kerja daerah
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - a. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
 - b. Penyiapan tenaga kerja siap pakai
 - c. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - a. Pembinaan Hubungan Industrial bagi pengusaha dan pekerja
 - b. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - c. Sosialisasi Berbagai Peraturan pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan
 - d. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - e. Pemantauan Kinerja lembaga Penyalur Tenaga Kerja
 - f. Survey Kebutuhan Hidup Layak Pekerja

**MATRIKS RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA
TAHUN 2018**

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA

KODE				PROGRAM/KEGIATAN	HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	LOKASI	KET		
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARGET					
1				2	3	4	5	6	7	8	9		
1					DINAS TENAGA KERJA								
2	01	2.01.01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi perkantoran	11.508	Pelayanan	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi perkantoran	11.508	Pelayanan	809.400.000	DINAS TENAGA KERJA
2	01	2.01.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat				Jumlah Surat yang terkirim selama setahun	1.443	Lembar	23.400.000	
2	01	2.01.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	2	Jasa	30.000.000	
2	01	2.01.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional				Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak	1	1 Mobil Dinas	25.000.000	
2	01	2.01.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan				Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	5	Orang	70.000.000	
2	01	2.01.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor				Jumlah Jasa Kebersihan	3	Orng	36.000.000	
2	01	2.01.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor				Cakupan Ruang Kantor yang Bersih	12	Bulan	70.000.000	
2	01	2.01.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Jumlah ATK	10.00	Lbr	40.000.000	

2	01	2.01.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	10	Unit Laptop/ Printer	250.000.000		
2	01	2.01.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan			Jumlah perlengkapan kantor	6	Media	20.000.000		
2	01	2.01.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah kerjasama dengan media	10	Kali	30.000.000		
2	01	1.01.01	01	18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah Kegiatan Makan dan Minum Rapat	13	Kali	200.000.000		
2	01	1.01.01	01	19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	3	Kali	15.000.000		
2	01	2.01.01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	21	Unit	21	Unit	287.000.000		DINAS TENAGA KERJA
2	01	2.01.01	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	2	Unit	37.000.000		
2	01	2.01.01	02	07	Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor			Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	10	Unit	60.000.000		
2	01	2.01.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah Gedung ayang terpelihara	1	Unit	25.000.000		
2	01	2.01.01	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak	1	Unit	15.000.000		
2	01	2.01.01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Jumlah Gedung yang direhabilitasi	1	Unit	150.000.000		
2	01	2.01.01	03		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	35	Orang	35	Orang	20.000.000		DINAS TENAGA KERJA
2	01	2.01.01	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Tersedianya pakaian tenun ikat	35	Orang	20.000.000		

2	01	2.01.01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Peningkatan Penguembangana Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9 Dokumen	Peningkatan Penguembangana Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9 Dokumen	209.000.000	DINAS TENAGA KERJA	
2	01	2.01.01	06	01	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jumlah Dokumen yang tersusun	4 Dokumen	40.000.000		
2	01	2.01.01	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran			Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	23.000.000		
2	01	2.01.01	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran			Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	23.000.000		
2	01	2.01.01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	23.000.000		
2	01	2.01.01	06	05	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah			Jumlah Dokumen yang tersusun	3 Dokumen	60.000.000		
2	01	2.01.01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD			Jumlah Dokumen yang tersusun	2 Dokumen	40.000.000		
2	01	2.01.01	15		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	150 Org/ Dok/Paket/ Perusahaan	Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	150 Org/ Dok/Paket/ Perusahaan	182.000.000	DINAS TENAGA KERJA	
2	14	1.13.01	15	01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah							
					- Pendataan dan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja			Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	12.000.000		
2	14	1.13.01	15	05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja							
					- Pengadaan Peralatan keterampilan bagi pelatihan tenaga kerja			Jumlah Pengadaan Bahan Praktek dan Kelengkapan Pelatihan	1 Paket	170.000.000		
2	14	1.13.01	15	06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja							
					- Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja			Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih	80 Org	200.000.000		

1	14	1.13.01	15	10	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja								
					- Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja			Jumlah Perusahaan yang Di Bina	68	Perusahaan	18.000.000		
2	01	2.01.01	16		PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Penyelenggaraan Peningkatan Kesempatan Kerja	1553	Org/ Tenaga Kerja/ Brosur/ Media	Penyelenggaraan Peningkatan Kesempatan Kerja	1553	Org/ Tenaga Kerja/ Brosur/ Media	275.000.000	DINAS TENAGA KERJA
1	14	1.13.01	16	01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja				600	Org	25.000.000		
2	14	1.13.01	16	02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja								
					- Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja			Jumlah Informasi Ketenagakerjaan dan Media Kerja Sama	594	Brosur/ Pamflet/ Media Kerja Sama	35.000.000		
					- Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri			Jumlah Peserta/ Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	100	Orang/ Peserta	35.000.000		
2	14	1.13.01	16	03	Kerjasama pendidikan dan pelatihan								
2	14	1.13.01	16	04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai								
					- Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai			Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai	40	Orang/ Peserta	90.000.000		
1	14	1.13.01	16	06	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat								
					- Pembinaan Tenaga Kerja mandiri (PKM)			Jumlah Kelompok/ Wirausaha yang di Bina	40	Orang/ Peserta	90.000.000		
2	01	2.01.01	17		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Tenaga Kerja	424	Perusahaan/ Org/Kasus/ Dokumen	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Tenaga Kerja	424	Perusahaan/ Org/Kasus	379.000.000	DINAS TENAGA KERJA

2	14	1.13.01	17	01	Pembinaan dan Pengendalian Lembaga Penyalur Tenaga Kerja								
					- Kegiatan Pembinaan Jaminan sosial Ketenagakerjaan			Lembaga Ketenagakerjaan yang dibina	98	Perusahaan		15.000.000	
					- Kegiatan PPA/ PKH (Sharing Kegiatan)			Jumlah Tenaga Kerja Anak (Tenaga Kerja Usia Sekolah)	108	Tenga Kerja Anak		15.000.000	
2	14	1.13.01	17	02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial								
					- Fasilitasi Perselisihan Hubungan Industrial			Jumlah Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	15	Kasus		37.000.000	
2	14	1.13.01	17	03	Kegiatan Pendampingan dan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan								
					- Kegiatan Penyusunan Dokumen Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup layak			Jumlah Dokumen	1	Dokumen		43.000.000	
					- Fasilitasi Dewan Pengupahan daerah			Kegiatan Dewan Pengupahan Daerah	1	Keg		43.000.000	
2	14	1.13.01	17	04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan								
					- Sosialisasi Undang-Undang BPJS Ketenaga kerjaan dan Kesehatan			Jumlah peserta Soialisasi	80	Orang		47.000.000	
					- Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Ketenaga kerjaan			Jumlah peserta Soialisasi	60	Orang		47.000.000	
2	14	1.13.01	17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja								
					- Sosialisasi Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan			Jumlah peserta Soialisasi	60	Orang		87.000.000	

					kerja (K3)							
2	14	1.13.01	17	06	penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja							
					- Penyusunan kebijakan Standarisasi lembaga Penyalur Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen yang tersusun	1	Dokumen	45.000.000		
<u>JUMLAH</u>										2.161.400.000		

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

Drs. Jufiri, M.Si
NIP. 19591231 198505 1 010

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kota Bima 2018, sehingga target indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Kerja ini dapat dipakai sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2018.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Bima dibuat sebagai Pedoman Dasar Dalam Kerangka Penyusunan RKPD Kota Bima Tahun Anggaran 2018.

Kami menyadari bahwa Renja ini masih jauh dari kesempurnaan / sesuai yang diharapkan maka saran dan pendapat sangat dibutuhkan, terima kasih.

Kota Bima, Juli 2017

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

Drs. Jufiri, M.Si

NIP. 19591231 198505 1 010